

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai arahan insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Boyolali dilakukan untuk merumuskan instrumen pengendalian yang dapat mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan, mulai dari analisis kesesuaian pemanfaatan ruang, analisis konsentrasi pemanfaatan ruang, analisis stakeholder, hingga perumusan arahan insentif dan disinsentif, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Boyolali mengalami perkembangan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan perubahan penggunaan lahan terbangun seluas 1.381 ha. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika pembangunan yang berpotensi memengaruhi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku.
2. Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan arahan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Boyolali. Namun demikian, masih ditemukan beberapa lokasi yang mengalami ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pengendalian.
3. Hasil analisis konsentrasi pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat konsentrasi rendah mendominasi Kabupaten Boyolali. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan ruang masih tersebar dan belum terkonsentrasi secara signifikan pada sebagian besar wilayah kabupaten.
4. Kawasan dengan tingkat konsentrasi sedang dan tinggi umumnya berada pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, pusat kegiatan perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, serta koridor jalan utama yang menjadi pusat pertumbuhan aktivitas masyarakat.
5. Hasil identifikasi stakeholder menunjukkan bahwa DPUPR Kabupaten Boyolali, Bapperida Kabupaten Boyolali, Forum Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali merupakan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa seluruh penilaian responden memiliki tingkat konsistensi yang baik dengan nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 0,03 pada

penentuan insentif dan 0,04 pada penentuan disinsentif, sehingga hasil pembobotan dapat digunakan sebagai dasar perumusan arahan kebijakan.

7. Bentuk insentif yang diprioritaskan dalam penelitian ini adalah penyediaan infrastruktur pada kawasan yang memiliki pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemberian insentif tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat dan pelaku pembangunan untuk mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang.
8. Bentuk disinsentif yang diprioritaskan adalah pembatasan dukungan infrastruktur pada kawasan yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan perkembangan aktivitas yang berpotensi memperparah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
9. Hasil overlay antara kesesuaian pemanfaatan ruang dan konsentrasi pemanfaatan ruang menghasilkan arahan insentif dan disinsentif yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.
10. Arahan insentif dan disinsentif yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efektif karena mempertimbangkan kondisi aktual wilayah serta tingkat intensitas aktivitas yang terjadi di dalamnya.
11. Hasil pengendalian pemanfaatan ruang berupa arahan insentif dan disinsentif dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi yang perlu diberi insentif maupun diberi disinsentif berdasarkan kondisi kesesuaian dan konsentrasi pemanfaatan ruang.
12. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang agar perkembangan wilayah tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai arahan insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Boyolali, diperlukan langkah-langkah implementatif agar arahan yang telah dirumuskan dapat mendukung pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menjadikan hasil arahan insentif dan disinsentif sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan yang mengalami tekanan perkembangan ruang yang tinggi.

2. DPUPR Kabupaten Boyolali direkomendasikan untuk memprioritaskan penyediaan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan yang telah sesuai dengan rencana tata ruang sebagai bentuk implementasi insentif guna mendorong kepatuhan terhadap arahan tata ruang.
3. Bapperida Kabupaten Boyolali dapat mengintegrasikan arahan insentif dan disinsentif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar terdapat sinkronisasi antara kebijakan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Forum Penataan Ruang Kabupaten Boyolali direkomendasikan untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai informasi pendukung dalam proses pertimbangan teknis pertanahan dan pengendalian perubahan penggunaan lahan.
6. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan data persil yang bersumber dari *OpenStreetMap* (OSM) sebagai pengganti data persil penggunaan lahan resmi. Penggunaan data OSM dilakukan karena keterbatasan akses dan tidak tersedianya data persil penggunaan lahan dari BPN Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data persil yang memiliki tingkat akurasi, kelengkapan, dan validitas yang lebih tinggi sehingga hasil analisis konsentrasi pemanfaatan ruang dapat menggambarkan kondisi eksisting secara lebih akurat.
7. Penelitian ini tidak menentukan atau mengatur bandwidth secara manual, melainkan menggunakan hasil Kernel Density yang kemudian diklasifikasikan menggunakan *natural breaks (jenks)* untuk menentukan kelas konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi.
8. Pada kawasan yang termasuk kategori II (sesuai rencana tata ruang dan memiliki tingkat konsentrasi sedang dan rendah), direkomendasikan penerapan insentif berupa penyediaan infrastruktur untuk mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang dan mendukung perkembangan wilayah secara terarah.

9. Pada kawasan yang termasuk kategori D1 (tidak sesuai rencana tata ruang dan memiliki tingkat konsentrasi tinggi), direkomendasikan penerapan disinsentif berupa pembatasan dukungan infrastruktur guna mengurangi potensi berkembangnya aktivitas yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
10. Bentuk penyediaan infrastruktur belum terdapat dalam peraturan yang ada di Kabupaten Boyolali, sehingga ini menjadi kelemahan penelitian ini.
11. Validasi lapangan terakut hasil akhir tidak dilakukan karena penelitian sudah menggunakan data sekunder spasial yang diperoleh dari instansi terkait dan data yang digunakan berasal dari data terbaru yaitu tahun 2025
12. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pemanfaatan ruang menggunakan basis data spasial yang mutakhir sehingga perubahan kondisi lapangan dapat teridentifikasi lebih cepat.
13. Hasil penelitian ini direkomendasikan sebagai bahan masukan dalam evaluasi RTRW maupun penyusunan RDTR pada wilayah yang mengalami perkembangan pemanfaatan ruang secara signifikan.